

## Prinsip – Prinsip *Good Governance* dalam Pemerintahan Dinasti Umayyah (Kajian Pada Masa Pemerintahan Islam : Muawiyah Bin Abu Sufyan 661-668 SM)

Amaliatulwalidain, MA<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri  
Jl Jend. Sudirman No. 629 KM. 4 Kode Pos : 30129  
Email : [amaliatulwalidain@uigm.co.id](mailto:amaliatulwalidain@uigm.co.id)<sup>1)</sup>

### Abstract

*The study in this paper is to discuss the principles of good governance applied in the administration system of Islamic governance in the Umayyad dynasty in Shia (Damascus) especially during the Muawiyah period of Bin Abu Sufyan. It is very interesting to study more deeply in the Umayyad administration system during the period of Muawiyah ibn Abu Sufyan's leadership, there was a major breakthrough in his administration with the open concept of Roman (Byzantium) Muawiyah Bin Abu Sufyan pioneering and pioneering the birth of the first bureaucratic system and state system in the history of civilization in Islamic government in the world. The bureaucratic system and the government system of the government of Muawiyah Bin Abu Sufyan, later became a reference for the system of Islamic governance in the future even today. The system of government during the Muawiyah bin Abu Sufyan period was in general and structured. For the sake of creating a good and directed governance system, several government departments (bureaucracy) and state institutions with different tasks, roles and functions for each department. The presence of the bureaucratic system and the government system is very helpful in the governance process, including the bureaucratic system, namely office work (postal correspondence), departmental stamps, transportation offices, secretarial offices, financial offices and trade watch offices, while the government system is implemented with a guard office and police station.*

**Keywords:** *Good Governance, Umayyah Dynasty Government System, Muawiyah Bin Abu Sufyan*

### Abstrak

*Studi dalam tulisan ini adalah membahas mengenai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) yang diterapkan dalam sistem administrasi pemerintahan Islam pada dinasti Umayyah di Syiah (Damaskus) khususnya selama periode kepemimpinan Muawiyah Bin Abu Sufyan. Sangat menarik untuk dikaji lebih dalam lagi bahwa dalam sistem administrasi Umayyah pada periode kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan, telah terjadi terobosan besar pada pemerintahannya dengan mengadopsi konsep pemerintahan dari Romawi (Byzantium) Muawiyah Bin Abu Sufyan telah merintis dan memelopori lahirnya sistem birokrasi dan sistem keamanan negara pertama dalam sejarah peradaban pemerintahan Islam di dunia. Bahkan sistem birokrasi dan sistem institusi keamanan dari pemerintahan Muawiyah Bin Abu Sufyan, kemudian menjadi acuan bagi sistem pemerintahan Islam dikemudian hari bahkan hingga saat ini. Sistem pemerintahan selama periode kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan dikelola secara teratur dan terstruktur. Demi menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan terarah, beberapa departemen pemerintah (birokrasi) dan lembaga keamanan negara dibentuk dengan pembagian tugas, peran dan fungsi yang jelas bagi masing-masing departemen. Kehadiran dari sistem birokrasi dan sistem keamanan tersebut secara sistematis sangat membantu dalam proses pemerintahan, diantara dari sistem birokrasi tersebut, di antaranya adalah kantor pos (korespondensi pos), stempel departemen, kantor transportasi, kesekretariatan, kantor keuangan dan kantor pengawas perdagangan, sedangkan sistem keamanan diimplementasikan dengan kantor pengawal dan kantor polisi.*

**Kata kunci:** *Good Governance, Sistem Pemerintahan Dinasti Umayyah, Muawiyah Bin Abu Sufyan*

## 1. Pendahuluan

Kegemilangan Islam setelah era Rasulullah SAW dan Khalifah Al Rasyidin wafat tidak dapat dilepaskan dari sebuah Dinasti yang selama hampir 90 tahun kekuasaannya mampu melakukan ekspansi hingga ke dataran Eropa dan Asia Selatan. Perluasan wilayah penyebaran Islam yang semula tidak terlalu ekspansif, pada masa Bani Umayyah justru menyebar sedemikian cepat dan luasnya. Meskipun sejarah Bani Umayyah tidak lepas dari kontroversi terutama mengenai peristiwa perpecahan di tubuh komunitas Muslim sendiri akibat adanya konflik dengan para keturunan Nabi Muhammad SAW, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kegemilangan Islam di berbagai bidang justru dimulai di era dinasti ini.

Tokoh Muawiyah cukup kontroversi dalam sejarah, namun tidak dapat dipungkiri banyak juga pujian yang dialamatkan kepada beliau sebagai politikus ulung. Nicholsan dalam bukunya *Literaty History of The Arabs* menulis jika Muawiyah adalah seorang diplomat yang cakap membandingkan kegemilangannya berpolitik dengan Richelieu, dan ketegasannya dengan Oliver Cromwell, politikus dan protektor Inggris yang termasyhur, yang pernah membubarkan parlemen Inggris.

Muawiyah juga adalah khalifah yang pertama kali mengubah pemerintahan menjadi sistem monarki (*sultane/kingship*). Beliau juga pernah berkata bahwa ialah sultan pertama diantara para sultan Arab lainnya. Model penentuan khalifah tersebut, banyak menuai protes dari rakyat kebanyakan, ketika Muawiyah berangkat ke Makkah dan Madinah untuk meminta legitimasi (*restu*) dari rakyat, kebanyakan rakyat meprotes model tersebut, tapi Muawiyah tidak gentar sehingga pergantian khalifah setelah beliau wafat adalah menurunkan tahta kekuasaan kepada anaknya, yang selanjutnya menjadi tradisi turun-temurun pada Dinasti Bani Umayyah (Fa'al, 2008 : 4).

Perluasan Islam pada masa itu menjadi ciri dari pemerintahan Muawiyah, daerah kekuasaan Dinasti Umayyah yang meliputi Spanyol, Afrika Utara, Suria, Palesyina, Semenanjung Arabia, Irak, Asia Kecil, Persia, Afganistan, Pakistan, Rukhmenia, Uzbekistan hingga Kirgis. Secara Administrasi manajemen pemerintahan pada Dinasti Umayyah juga mempelopori lahirnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang diimplementasikan melalui sistem birokrasi yang mengadopsi dari sistem pemerintahan Byzantium, melalui pengawasan yang dilakukan langsung oleh khalifah dan dibantu oleh berbagai departemen-departemen yang bertugas mengawasi pajak, waris, sewa tanah, hingga proyek pembangunan. Sistem pemerintahan birokrasi yang dijalankan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, kemudian diyakini banyak memberi pengaruh bagi sistem pemerintahan Islam selanjutnya, bahkan setelah keruntuhan dinasti Umayyah.

Metodelogi dalam penelitian ini juga menggunakan metode sejarah sebagai proses menguji dan menganalisis secara sistematis dan objektif, dengan cara

mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta menginterpretasikan data-data baik berupa data primer ataupun data sekunder untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan. Dari penjelasan itu, maka dasar penulisan penelitian ini dengan metode sejarah, merupakan metode yang dapat memberikan penulis panduan ketika proses penelitian (Gottschalk, 1986:32). Oleh karena itu, penulis memberikan sedikit gambaran aplikasi metode sejarah didasarkan pada tiga tahapan yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, sedangkan jenis penelitian ini, adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu studi yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap data-data pustaka yang relevan. Data kepustakaan sangat diperlukan dalam penelitian ini sebagai literatur yang mendukung baik sebagai sumber primer dan sekunder.

## 2. Pembahasan

### A. Sekilas Tentang Muawiyah Bin Abu Sufyan

Muawiyah Bin Abu Sufyan dilahirkan di Makkah 15 tahun sebelum hijrah, dari kedua orang yang bernama Abu Sufyan Bin Harb dan Hindun Binti Utbah. Abu Sufyan sendiri adalah salah satu tokoh Quraisy dari Bani Umayyah yang terang-terangan menentang dakwah Rasulullah Saw, sama halnya seperti suaminya, Hindun pun berlaku demikian kepada kaum muslimin dan sangat membenci Rasulullah Saw. Tetapi ketika penaklukan Makkah atau yang dikenal dengan istilah *Fathu Makkah* Abu Sufyan Bin Harb dan Hindun Binti Utbah kemudian memeluk Islam yang juga diikuti oleh anaknya Muawiyah Bin Abu Sufyan. Setelah memeluk Islam, Muawiyah ikut serta menulis wahyu dihadapan Rasulullah saw (Syeikh Muhammad Khudari Beik, 2012 : 155). Pasca peristiwa *Fathu Makkah* dengan masuk Islamnya Muawiyah Bin Abu Sufyan, maka seketika itu juga, praktis kehidupan Muawiyah akan sangat dekat dengan perjuangan umat Islam pada masa Rasulullah Saw. Sebagian besar hidupnya ditahbiskan untuk membantu perjuangan umat Islam pada masa itu, dengan diawali sebagai juru tulis dan penulis wahyu.

Muawiyah Bin Abu Sufyan, dikatakan sangat berbakat dalam memimpin. Semua karakter dalam memimpin terpadu dalam dirinya. Keberanian menjadi salah satu keutamaannya. Dari seorang prajurit gurun pasir, dia lah orang pertama yang mengarungi lautan. Dalam mengaplikasikan keberaniannya, Muawiyah lebih banyak menyandarkan nalarnya daripada menggunakan perasaan. Seperti ketika Muawiyah Bin Abu Sufyan ditantang oleh Ali Bin Abi Thalib untuk bertanding satu lawan satu menjelang terjadinya Perang Shiffin. Muawiyah menyadari kemampuannya. Dia tidak mungkin mengalahkan Ali Bin Abi Thalib dengan perang fisik karena Muawiyah tidak bisa memungkiri, bahwa Ali adalah seorang tentara yang jago perang dan lihai memainkan pedang. (Hepi Andi Bastoni, 2012:242). Sifat Muawiyah Bin Abu Sufyan yang paling menonjol, adalah tepat dalam mengambil keputusan, terutama keputusan yang berkaitan dengan strategi politik baik

menyangkut hubungan dengan musuh-musuhnya ataupun dalam pembentukan pemerintahan Bani Umayyah. Muawiyah juga termasuk orang yang sering sekali mengevaluasi keputusannya dengan mengamati hasil keputusannya melalui sisi negatif dan positif. (Ash-Shallabi, 2012:68)

Bintang Muawiyah mulai muncul, terutama ketika dipercaya menjadi panglima perang pada masa khalifah Umar Bin Khattab, dimana Umar kala itu menugaskannya untuk menaklukkan Qaisariyah ditahun 15 Hijriah. Dengan tugas yang diberikan oleh Umar Bin Khattab, Muawiyah Bin Abu Sufyan kemudian bergerak ke Qaisariyah dengan pasukan yang telah disiapkan oleh Yazid Bin Abu Sufyan saudaranya yang menjabat gubernur Syam. (Ali Muhammad Ash-Shallabi, 2012:67).

Kota Qaisariyah sendiri adalah kota dengan benteng yang kokoh yang dijaga oleh pasukan perang yang tangguh, Muawiyah mengepungnya dalam waktu yang panjang. Beliau dan pasukannya beberapa kali menyerang kota ini. Perang yang tidak seimbang antara pasukan Muawiyah yang sedikit jumlahnya dengan pasukan musuh, kerap kali mengalami kekalahan, tetapi situasi tersebut tidak menyurutkan nyali Muawiyah serta pasukannya untuk terus menyerang musuh, semangat dan strategi psikologis yang diterapkan Muawiyah akhirnya membuat pasukan musuh kewalahan dan menuai kekalahan.

Kemenangan Muawiyah Bin Abu Sufyan terhadap penaklukan Qaisariyah kemudian menjadi prestasi tersendiri yang selanjutnya dibuktikan dengan kegemilangan Muawiyah dalam menaklukkan beberapa wilayah lainnya, salah satunya yaitu keberhasilan menaklukkan Byzantium Romawi.

Setelah Muawiyah sukses dengan kemenangannya menaklukkan Qaisariyah dan mengamankan pesisir Damaskus, Umar kemudian mengangkatnya sebagai gubernur Yordania pada tahun 17 Hijriah dan pada tahun 18 Hijriah atas perintah Umar Bin Khattab pula Muawiyah kemudian dipercaya untuk menggantikan posisi saudaranya Yazid Bin Abu Sufyan yang meninggal karena penyakit Thau'Amwas untuk memimpin Damaskus, Ba'labak, dan Balqa. (Ali Muhammad Ash-Shallabi, 2012:70).

Pengangkatan Muawiyah Bin Abu Sufyan menjadi pengganti Yazid Bin Abu Sufyan di Damaskus tak pelak membuat berbagai kalangan sahabat pada masa itu sedikit menuai protes dan keheranan, mereka mempertanyakan atas dasar apa Umar Bin Khattab begitu mempercayai dengan mengangkat Muawiyah Bin Abu Sufyan, padahal mereka menganggap masih banyak pilihan yang layak lainnya untuk dipertimbangkan, tetapi dengan bijak, Umar Bin Khattab berani menjamin bahwa pilihannya, untuk memilih Muawiyah Bin Abu Sufyan sebagai gubernur pengganti Yazid Bin Abu Sufyan, adalah pilihan yang tepat, karenanya tidak bisa dipungkiri bahwa prestasi, kapasitas dan kepemimpinan Muawiyah Bin Abu Sufyan, telah membuat Umar Bin Khattab begitu mempercayai Muawiyah.

Pada Masa kepemimpinan khalifah Utsman Bin Affan, tampuk kekuasaan Muawiyah di bumi Syam semakin bertambah luas, setelah wilayah Himsh dan Palestina di berikan penuh kepada Muawiyah Bin Abu Sufyan untuk memimpin setelah gubernur sebelumnya yaitu Alqamah bin Muhriz wafat. Masa kekuasaan Muawiyah Bin Abu Sufyan sebagai gubernur Syam adalah masa-masa yang sarat dengan peristiwa-peristiwa, Syam merupakan kantong wilayah jihad terpenting karena Islam telah mendominasi di wilayah tersebut. (Ali Muhammad Ash-Shallabi, 2012:78)

Bahkan setelah, Ali Bin Abi Thalib wafat, jabatan khalifah yang sebelumnya digantikan putranya Hasan Bin Ali selama beberapa bulan, kemudian digantikan oleh Muawiyah Bin Abu Sufyan dengan proses membai'at Muawiyah sebagai khalifah pada 12 Rabiul Awal 41 Hijriah (Abdusyafi Muhammad, 2014 : 13) Dengan dibai'atnya Muawiyah sebagai khalifah, maka resmi berdiri Dinasti Umayyah. Sebagai khalifah yang baru. Dengan penobatannya, praktis ibu kota provinsi Suriah, Damaskus berubah menjadi ibu kota kerajaan Islam. Meskipun telah resmi dinobatkan menjadi khalifah, Muawiyah masih memiliki kekuasaan yang terbatas. Sebagian wilayah masih belum mengakui kekhalifahannya. Penduduk Irak masih menganggap Hasan putra tertua Ali sebagai khalifah penerus Ali Bin Abi Thalib, sedangkan penduduk Mekkah dan Madinah tidak memiliki loyalitas yang kuat terhadap khalifah keturunan Sufyan, karena mereka baru mengakui kenabian Muhammad pada saat penaklukan Mekkah. (Hitti, 2002 : 236)

Dipilihnya Damaskus sebagai ibu kota dari Daulah Umayyah, karena posisi Damaskus yang dianggap strategis, berada ditengah-tengah negeri Islam bagian timur yang mencakup Irak dan Persia dan belahan barat yang mencakup Mesir dan Afrika. Di Damaskus juga Muawiyah menemukan tatanan birokrasi dan kekuasaan yang mengakar kokoh. ( Ash-Shallabi, 2012 : 344)

Tidak diragukan lagi, bahwa sebagian besar prestasi Dinasti Umayyah adalah penaklukannya terhadap beberapa kota diberbagai benua, meliputi Asia, Eropa, dan Afrika. Di Asia, Dinasti Umayyah berhasil menaklukkan Transoxiana ( Asia Tengah ), yakni daerah – daerah di yang terletak di sungai Jihun dan sungai Sihun, serta wilayah Sindh ( Pakistan ) ditambah lagi dengan wilayah-wilayah yang sudah ditaklukan sebelumnya pada masa Khalifa Rasyidin, terutama ( Persia, Khurasan, Sijistan, Jirjan, Tibristan, Armenia, Azerbaijan ) yang kemudian menjadi wilayah-wilayah utama dalam dunia Islam. ( Abdusyafi, 2014 : 295)

Penaklukan-penaklukan pada era Dinasti Umayyah bukan hanya sekedar ekspansi militer, melainkan penaklukan yang bersifat keagamaan, bahasa, dan budaya. Hal ini tampak jelas pada kebijakan Dinasti Umayyah dalam perang dan penaklukan. Kecerdasan Dinasti Umayyah tampak pada cara mengelola negara, terutama pada administrasi dan tata negara.

### B. Prinsip-prinsip Good Governace dalam Sistem Pemerintahan Muawiyah Bin Abu Sufyan

Ketika pemerintahan kekhalifahan Rasyidin beralih ke tangan Muawiyah Bin Abu Sufyan, maka berubah pula sistem pemerintahan. Perubahan sistem pemerintahan yang kemudian dikenal dengan istilah “monarki” atau kerajaan dengan kepemimpinan turun temurun. Muawiyah mengubah khilafah menjadi sebuah kerajaan, dan penetapan pemerintahan oleh dinasti-dinasti dalam Islam. Madinah, kaum Anshar dan bangsa Arab dari semenanjung Arabia kehilangan pengaruh mereka dalam kekhalifahan. (Rusydi Sulaiman, 2014 : 253).

Dalam menjalankan roda pemerintahan yang stabil, Muawiyah turun langsung dalam menangani urusan kenegaraan, Muawiyah menghapuskan sistem pemerintahan tradisional dan mengadopsi sistem pemerintahan Byzantium dengan mendirikan berbagai institusi-institusi dalam menjalankan roda pemerintahannya untuk menghubungkan berbagai wilayah imperium yang luas. ( Hitti, 2002 : 242 ). Khalifah Muawiyah mendirikan suatu pemerintahan yang terorganisasi dengan baik selain imperium yang didesentralisasikan, Muawiyah juga mengubah kedaulatan negara menjadi negara sekuler.

Selain mengubah kedaulatan negara menjadi negara sekuler, Muawiyah juga dengan sengaja mendirikan departemen pencatatan (*diwanul-kahatam*), mendirikan pelayanan pos ( *diwanul-barid*). *Barid* ( kepala pos) memberita tahu pemerintah pusat tentang apa yang sedang terjadi dalam pemerintahan provinsi. Muawiyah sengaja membentuk dua sekretariat – sekretariat imperium pusat yang menggunakan bahasa Arab, dan sekretariat provinsi yang menggunakan bahasa Yunani dan Persia.(Mahmudasir, 2005 : 176 )

Sebagai Administrator yang berpendangan jauh, Muawiyah juga sengaja memisahkan urusan keuangan dari urusan pemerintahan. Dia mengangkat seorang Gubernur disetiap provinsi untuk melaksanakan pemerintahannya, akan tetapi untuk memungut pajak ditiap-tiap provinsi, Muawiyah mengangkat seorang petugas khusus dengan gelar *sahibul-Kharaj*. (Mahmudasir, 2005 : 177 )

### C. Sistem Administratif Pada Masa Pemerintahan Muawiyah Bin Abu Sufyan

#### 1. Kantor Surat Menyurat

Kantor ini bertugas mengawasi pembuatan surat-menysurat khalifah, perintah-perintahnya, perjanjian-perjanjiannya, wasiat-wasiat dan perjanjian kontrak kerja dengan para pegawainya di daerah-daerah sampai luar negeri yang masih memiliki hubungan dengan negara Islam. Kantor surat-menysurat ini adalah sarana penghubung khalifah Muawiyah Bin Abu Sufyan dengan para gubernur, para panglima, pasukan, para hakim, para petugas dikabilah-kabilah yang bertanggung jawab kepada khalifah dan dibawah pengawasan langsung darinya. (Ash-Shallabi, 2012 : 402 )

#### 2. Kantor Stempel ( *Diwan Al – Khatim* )

Selain kantor surat-menysurat, Muawiyah Bin Abu Sufyan juga mendirikan kantor stempel untuk menjamin kerahasiaan surat-surat negara, sehingga tidak akan bocor ketangan mata-mata musuh dan tidak dijamah oleh tangan pengkhianatan. Tujuan dari pendirian kantor stempel adalah menghindari pemalsuan dan mencegah kemungkinan surat-surat khalifah dipergunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya kantor ini berfungsi seperti kantor Arsip surat-surat yang diterbitkan oleh negara dan negara mengandalkan dalam meneliti kembali perintah-perintahnya dan surat menyurat yang berkaitan dengan anggaran dan belanja negara, antara negara pusat Khilafah dengan daerah-daerah. Kantor ini juga mengawasi proses kerja kantor-kantor lainnya dan meluruskan kekeliruan yang mungkin terjadi. Pendirian kantor ini juga merupakan tuntutan keadaan, dimana wilayah negara semakin luas, sehingga Muawiyah sebagai khalifah membutuhkan sebuah tatanan yang aman dan rahasia dalam rangka memantau para gubernurnya, para panglima perangnya, dan orang-orang yang ditugaskannya. (Ash-Shallabi, 2012 : 404 – 405 ).

#### 3. Kantor Perhubungan ( *Diwan Al – Barid* )

Para ahli Sejarah menyebutkan bahwa Muawiyah adalah orang yang pertama memasukkan tatanan perhubungan dalam negara Islam. Dia memerintahkan agar menyiapkan kuda-kuda dan menata kuda-kuda tersebut diberbagai tempat. Kuda pada zaman itu menjadi sarana transportasi yang paling penting selain baghl (hemar), selain kuda sebagai alat transportasi harus ditopang juga melalui jalan-jalan sebagai sarana pendukung agar transportasi dapat berjalan dengan lancar.

Fungsi didirikannya kantor Perhubungan, bertujuan untuk menyampaikan berita-berita atau surat menyurat terutama kepada daerah yang masuk dalam pemerintahan pusat, terutama antara Syam dengan Hijaz. Biasanya surat yang dibawa melalui seorang kurir akan membutuhkan waktu yang sangat lama sampai kepada daerah dan penerima yang dituju , akan tetapi dengan adanya kantor surat-menysurat tersebut keadaan sedemikian dapat diminimalisir (Ash-Shallabi, 2012 : 405 – 406 ) Kantor ini dalam praktiknya tidak hanya membawa surat dan melayani kepentingan dari pemerintah dan negara, terkadang juga membantu kepnetingan masyarakat dengan membawa surat-menysurat merek dari satu daerah ke daerah lainnya.

#### 4. Kesekretariatan ( *Diwan Ar – Rasa’il* )

Peran juru tulis pada masa pemerintahan Muawiyah sangat penting, setiap kantor administrasi memiliki seorang juru tulis, dari kantor militer hingga kantor peradilan memiliki juru tulis. Tugas para juru tulis disetiap kantor menulis perintah-perintah khalifah lalu menyerahkannya ke kantor stempel, setelah sebelumnya direkatkan dan disegel dengan lilin, kemudian distempel dengan stempel kepala kantor. (Ash- Shallabi, 2012 : 407)

5. Kantor Keuangan (*Diwan Al – Kharraj* )

Diwan Al-Kharraj adalah kantor yang diperuntukkan untuk masalah keuangan. Seluruh pemasukan negara yang berupa *ghanimah* (rampasan perang ), *Jizyah* ( pajak tanah ), zakat dan *Ushur* atau pajak-pajak yang dipungut dari para pedagang atas berbagai macam dagangan yang mirip dengan cukai barang masuk pada masa sekarang. Para pedagang terdiri atas tiga macam, yaitu pedagang Muslim yang dipungut 0,25 persen dari nilai barang dagangan mereka, kemudian kelompok *Ahli Dzimmi* yang dipungut sebesar 0,5 dan pedagang *Ahli Harb* yang dipungut 1 persen. Ketiganya tidak akan dipungut apabila nilai dagangan mereka kurang dari 200 dirham. Seluruh pemasukan tersebut disetorkan ke Baitul Mal yang dikuasai oleh *Diwan Al-Kharraj* pusat yang berada di Damaskus. Masing-masing wilayah memiliki diwan yang bersifat lokal di Irak terdapat Diwan, di Mesir juga terdapat Diwan. ( Abdussyafi, 2014 : 540).

Diwan-diwana lokal tersebut menghimpun segala macam uang yang masuk, kemudian menyalurkan sebagaimana mestinya, terutama untuk membayar gaji para tentara dan pejabat serta kebutuhan fasilitas publik seperti untuk membangun jalan, jembatan, dan lainnya. Setelah itu diwan lokal mengirimkan dana yang tersisa ke Baitul Mal pusat yang berada di Damaskus yang kemudian menyalurkannya. Lahan penyaluran sangat banyak, contohnya seperti biaya operasional istana kekhalifahan, gaji tentara dan para pejabat, serta pendanaan terhadap fasilitas umum milik negara.

## 6. Kantor Pengawas Perdagangan

Kantor pengawas perdagangan bisa dikatakan sebagai salah satu inovasi dibidang perekonomian yang terlembagakan pada pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Kantor pengawas perdagangan bertugas dan bertanggung jawab terhadap ketertiban pasar dan aktivitas perdagangan di dalamnya. Adapun tugas-tugas dari kantor pengawas perdagangan adalah sebagai berikut : ( Ash-Shallabi, 2012 : 538 )

1. Memastikan keakuratan timbangan, takaran dan ukuran-ukuran perdagangan lainnya dalam proses jual beli, untuk mencegah penipuan dalam transaksi.
2. Melakukan sidak (inpeksi mendadak) terhadap standar bandul timbangan guna menjamin ketepatannya.
3. Mencegah kenaikan harga yang ekstrim dari harga pasar.
4. Melarang penimbunan dan memaksa penimbun menjual barangnya. Kantor pengawas perdagangan juga turut berkordinasi dengan Kantor Keuangan, terutama dalam mengumpulkan pajak dari barang-barang perniagaan pedagang dan sewa kios milik negara.

## D. Sistem Keamanan Pada Masa Muawiyah Bin Abu Sufyan

Diantara dasar-dasar yang menjadi pijakan Muawiyah dalam menata politik dalam negerinya adalah mengokohkan stabilitas keamanan dimasa kekhalifahannya. Demi mewujudkan tujuan tersebut, Muawiyah membuat beberapa lembaga keamanan, diantaranya :

## 1. Ajudan / Pengawal

Muawiyah Bin Abu Sufyan adalah pemimpin pertama dalam Islam yang memiliki ajudaan, demi mencegah kemungkinan penyerangan terhadap dirinya. Berdasarkan kejadian yang menimpa tiga khalifah sebelumnya, yang menjadi korban pembunuhan, maka sekiranya penting untuk menjaga stabilitas keamanan yang kokoh dengan membentuk tatanan penjagaan dan perlindungan terhadap dirinya. Untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang akan mengancam keselamatan dirinya terutama dari upaya Khawarij yang masih berniat membunuhnya, maka diterapkannya aturan protokoler kerajaan, salah satunya khalifah membatasi diri untuk bertemu langsung dengan rakyatnya, tetapi melalui perantara (pengawal) yang disebut *Hajib* (Ajudan). (Ash – Shallabi, 2012 : 271)

Muawiyah juga memerintahkan agar ruang-ruang khusus di masjid di kawal oleh penjaga, dan yang diperbolehkan masuk hanya orang-orang yang mendapat kepercayaan dari para pengawalnya. Selain itu Muawiyah juga membuat sebuah ruangan khusus untuk dirinya dari penyerangan yang bisa saja menimpa dirinya.

Ajudan ditugaskan harus duduk dipintu istana untuk mengatur orang-orang yang hendak menemui khalifah yang didasarkan kepada kedudukan, tujuan dan maksud kedatangan mereka. Seorang ajudan melaksanakan tugas layaknya kepala staf kepresidenan atau kepala dewan kerajaan dalam peraturan modern. Mengingat begitu pentingnya jabatan tersebut, khalifah Umayyah tidak memberikan jabatan tersebut, kecuali hanya kepada orang-orang yang mereka percayai dan umumnya berasal dari kalangan keluarga yang yang memiliki kemuliaan dan intelegensi yang tinggi . Para penguasa Dinasti Umayyah menginginkan agar ajudan para penguasa wilayah yang ada di berbagai wilayah memiliki tingkat kemampuan yang sama. ( Abdussyafi, 2014 : 556 )

## 2. Polisi

Selain ajudan, Muawiyah juga membentuk tatanan kepolisian yang bertugas menjaga kestabilan keamanan dan undang – undang, menangkap pencuri, para penjahat dan para perusuh, membela khalifah, namun polisi btidak bertanggung jawab mencegah serangan apa pun dari luar negara. Keberadaan kepolisian tidak hanya di ibu kota negara saja, tetapi juga terdapat di daerah – daerah yang masuk dalam wilayah pemerintahan Dinasti Umayyah dan bertanggung jawab penuh kepada gubernur . (Ash-Shallabi, 2012 : 410)

Ketika Negara Umayyah berdiri, urgensi departemen kepolisian semakin bertambah seiring dengan situasi dan kondisi yang dialami saat itu. Kepolisian memiliki pengaruh besar dalam menjaga keamanan dan membersihkan negara dari unsur perusakan dan gangguan keamanan serta menumpas para penentang pemerintah yang ada di dalam negara. (Abdussyafi, 2014 : 554 )

Para khalifah Dinasti Umayyah berupaya untuk memilih aparat kepolisian dari orang-orang yang memiliki kewibawaan dan juga ketegasan. Para penguasa Umayyah memberikan kebebasan kepada pejabat kepolisian untuk memilih ajudan mereka agar dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Pejabat kepolisian baik itu berada di ibu kota kekhalifahan maupun ibu kota wilayah merupakan alat pemerintahan. (Abdussyafi, 2014 : 555)

Polisi memiliki kedudukan tersendiri di Dinasti Umayyah, karena tugas-tugas penting yang mereka emban didepan negara dan masyarakat, diantaranya: (Ash-Shallabi, 2012 : 536 )

1. Melindungi Khalifah dan para Gubernur daerah terhadap lawan-lawan mereka di dalam
2. Menghukum para pelaku kejahatan dan orang-orang yang melanggar undang-undang.
3. Melaksanakan hukuman-hukuman Syar'i.

Keberadaan kepolisian juga ditujukan untuk mengabdikan kepada masyarakat dan bertanggung jawab atas nyawa masyarakat hak-hak dan harta-harta mereka dari pelanggaran. Negara mengandalkan mereka dalam menghadapi para pembangkang, membasmi pemberontakan, memadamkan kekacauan, dan terkadang menggantikan tugas pasukan perang saat mereka memberi perhatian dan partisipasi dalam peperangan. Melalui ketegasan dan dedikasi dari aparat kepolisian dalam menjaga keamanan maka kestabilan seluruh negeri bisa terjaga. (Ash-Shallabi, 2012 : 412)

### 3. Kesimpulan

Tidak sedikit kemajuan yang telah dicapai oleh Dinasti Umayyah dalam rentang waktu 90 tahun puncak kejayaannya, bingkai sejarah yang di torehkan menjadi sejarah tersendiri bagi kegemilangan Dinasti Umayyah pada masa itu, tentu hal tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan Muawiyah Bin Abu Sufyan sebagai salah satu khalifah pada pemerintahan Dinasti Umayyah.

Perluasan Islam pada masa itu menjadi ciri dari pemerintahan Muawiyah, daerah kekuasaan Dinasti Umayyah yang meliputi Spanyol, Afrika Utara, Suria, Palesyina, Semenanjung Arabia, Irak, Asia Kecil, Persia, Afganistan, Pakistan, Rukhmenia, Uzbekistan hingga Kirgis. Secara Administrasi manajemen pemerintahan pada Dinasti Umayyah juga memelopori lahirnya sistem birokrasi yang mengadopsi dari sistem pemerintahan Byzantium , melalui pengawasan yang dilakukan langsung oleh khalifah dan dibantu oleh berbagai departemen-departemen yang bertugas

mengawasi pajak, waris, sewa tanah, hingga proyek pembangunan.

Muawiyah merupakan orang pertama dalam Islam yang mendirikan suatu departemen pencatatan (*diwanul-kahatam*). Setiap peraturan yang dikeluarkan oleh Khalifah harus disalin di dalam suatu catatan, kemudian yang asli harus disegel dan dikirimkan ke alamat yang dituju. (Mahmudasir, 2005 : 175 ). Selain itu juga sistem Administrasi pada masa pemerintahan Muawiyah, bisa dikatakan tersistematis. Muawiyah dengan sengaja mengembangkan negara secara administratif dengan membentuk *diwan – diwan* dan instrumen – instrumen negara dengan cara mendirikan kantor-kantor Administrasi serta kantor keamanan negara.

### Daftar Pustaka

- Al-Maududi, 1998 Abul A'la. *Khilafah Dan Kerajaan*. Bandung : Mizan.
- Andi Bastoni, Hepi. 2012. *Wajah Politik Muwiyah Bin Abu Sufyan*. Bogor : Pustaka Al Bustan.
- Budiarjo, Miriam. 1977. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.
- Edyar, Busman. 2009. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta : Pustaka Asatruss.
- Fa'al, M, Fahsin. 2008. *Sejarah Kekuasaan Islam*. Jakarta : Artha Rivera.
- Faturrohman, Deden & Wawan Sobri. 2002. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang : UMM Press.
- Fletheim, K, Ossip. 1992. *Fundamental Of Political Science*. New York : Ronal Press..
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta : Universitas Indonesia..
- Hamka, *Sejarah Umat Islam (Jilid IV)*. Jakarta : Bulan Bintang. 1981
- Haque, Atiqul. 1995. *Wajah Peradaban (Menelusuri Jejak Pribadi-Pribadi Besar Islam)*. Bandung : Zaman.
- Jordac, George. 1997. *The Voice Of Human Justice*. Terj Abu Muhammad Assajad. *Suara Kedilan Sosok Agung Ali Bin Abi Thalib (Cetakan 1)*. Lentera: Baristama.
- Karim, M, Abdul. *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam*. Yogyakarta : Pustaka Book Publisher. 2007.
- Ladipus, Ira, M. 1999. *Sejarah Sosial Umat Islam (Bagian Satu & Dua)*. Jakarta : PT Grafindo.
- Mahmudunnasir, Syed. 1988. *Islam Konsepsi Dan Sejarahnya*. Bandung : Rosdakarya.
- Munir Amin, Samsul. 2009. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta : AMZAH..
- Nizar, Syamsul. 2003. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta : Kencana Press. Syalabi, A. *Sejarah Kebudayaan Islam 2*. Jakarta : Pustaka Al Husna.
- Qardhawi, Yusuf. 2005. *Menelusuri Sejarah Umat Islam*. Jakarta : PT Grafindo.
- Soekanto, Soejono. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Grafindo.
- Sulaiman, Rusydi. *Pengantar Metodologi Studi Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta : PT Grafindo. 2014

- Thohir, Ajid. 2004. *Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam*. Jakarta : PT Grafindo.
- Yatim, Badri. 2000. *Sejarah Peradaban Islam (Dirasah Islamiyah I)*. Jakarta : PT Grafindo.